

PRIORITAS NASIONAL

INFRASTRUKTUR Pembebasan Lahan Jalan Tol

Untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah berkomitmen membangun 1000 km jalan tol, dengan target penyelesaian tahun ini sepanjang 108 km. Namun, pembangunan ini terkendala masalah pembebasan lahan, antara lain:

1. Ketidakjelasan mekanisme ganti rugi tanah ([#1351081](#), [#1352895](#))
2. Perumusan konsensus harga ganti rugi tanah ([#1351049](#))
3. Keterlambatan penyaluran uang ganti rugi tanah ([#1352895](#))

Meski Pemerintah telah dibekali Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya, ternyata hambatan-hambatan tersebut masih kerap ditemui. Masalah seringkali bermula dari ketidaksamaan persepsi dalam mekanisme penilaian harga tanah antara masyarakat dengan tim penilai, sehingga perlu sosialisasi intensif ke masyarakat serta penilaian secara berkeadilan oleh tim penilai. Penetapan dan penyaluran dana ganti rugi juga harus dipercepat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

LINGKUNGAN HIDUP PETI di Daerah Aliran Sungai

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Daerah Aliran Sungai (DAS) marak terjadi dan merusak lingkungan. Masalah PETI antara lain dilaporkan terjadi di DAS Sungai Indragiri, Kab. Indragiri Hulu - Riau ([#1351957](#)) dan Sungai Raya, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat ([#1348600](#)). Meski telah ditindak, sejumlah pelaku ternyata mengulangi perbuatannya.

Diperlukan upaya sosialisasi, pencegahan, penertiban, dan pengawasan aktivitas pertambangan dari pemerintah khususnya pemda, mengingat dampak lingkungan yang muncul akan merugikan masyarakat karena aspek kelestarian alam diabaikan. Pemerintah pusat juga perlu merumuskan pola pencegahan dan penindakan agar pemda lebih terkoordinasi dan berkomitmen dalam mengatasi hal ini.

INDUSTRI Izin P-IRT untuk UMKM

Izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan wajib didapatkan pengusaha industri makanan skala rumah tangga agar dapat mengedarkan produknya. Namun, hal ini seringkali menjadi kendala karena belum tersosialisasikannya prosedur dan pasifnya sejumlah Dinas Kesehatan dalam mendorong pengurusan perizinan oleh UMKM.

Masalah yang mengemuka adalah mengenai biaya yang harus dikeluarkan pelaku industri rumah tangga dalam pengurusan P-IRT. Sejumlah pemda perlu diapresiasi karena telah menyediakan kuota pengurusan dan penyuluhan gratis, namun tentunya masih perlu ditingkatkan agar dapat mengakomodasi lebih banyak pelaku usaha ([#1351984](#)).

Pemerintah pusat dan daerah harus menjadi pionir dalam memajukan UMKM. Diperlukan partisipasi aktif dan insentif untuk pengusaha UMKM agar dapat meningkatkan dan memastikan kualitas produknya, apalagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah di depan mata.

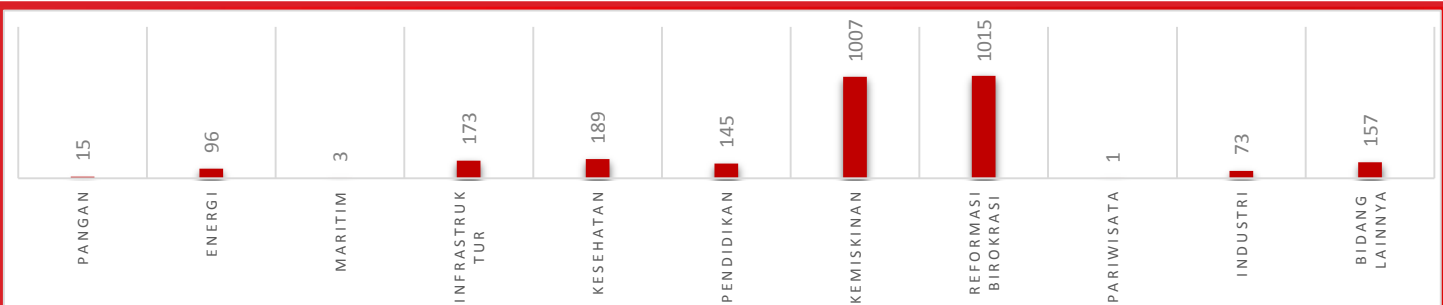
REFORMASI BIROKRASI Keluhan Layanan Pos

Pengiriman paket barang dari/ke luar negeri melalui PT Pos Indonesia dikeluhkan. Beberapa laporan diantaranya:

1. Paket tertahan di Bea Cukai/Kantor Pos [1351559](#), [1351947](#), [1353314](#)
2. Paket kiriman rusak [1352623](#)
3. Paket tidak kunjung diterima [1350798](#), [1353258](#), [1352910](#), [1353015](#), [1349548](#), [1349791](#), [1349548](#), [1352910](#), [1353156](#)
4. Status pengiriman salah/tidak terlacak di situs [1352156](#), [1352164](#)

Perlu peningkatan kualitas layanan dari PT Pos Indonesia serta penegasan tugas dan tanggung jawab antara PT Pos Indonesia dan Bea Cukai dalam menangani keluhan-keluhan ini agar terselesaikan dengan baik dan tidak terulang.

KATEGORI LAPORAN PRIORITAS NASIONAL



PENGELOLAAN LAPORAN MASYARAKAT

Tindak Lanjut Instansi

Tindak Lanjut BUMN dan Maskapai

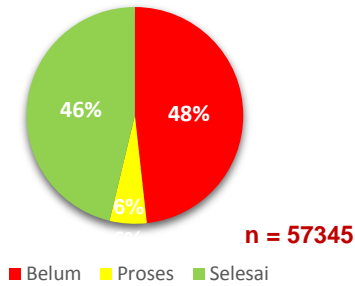
Beberapa BUMN yang kurang aktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat di LAPOR! diantaranya adalah PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Sedangkan maskapai yang perlu meningkatkan responsnya adalah Citilink dan Wings Air. BUMN yang responsif antara lain PT Pos Indonesia, sementara maskapai yang aktif adalah Garuda Indonesia dan Lion Air.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan perlu merapatkan koordinasi agar BUMN dan maskapai yang berada di bawah tugas dan fungsinya lebih aktif menindaklanjuti laporan masyarakat yang berisi aspirasi/pengaduan.

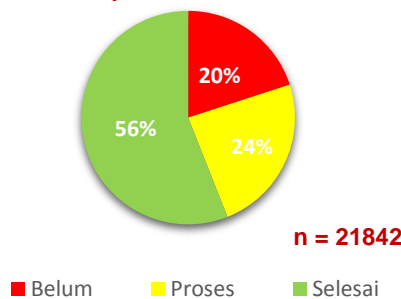
Statistik selengkapnya: <https://www.lapor.go.id/statistik/>

STATISTIK KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA S.D. JUNI 2015

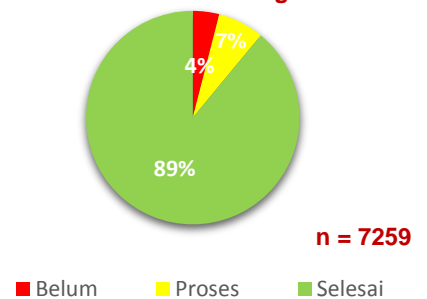
Status Laporan
Kementerian/Lembaga



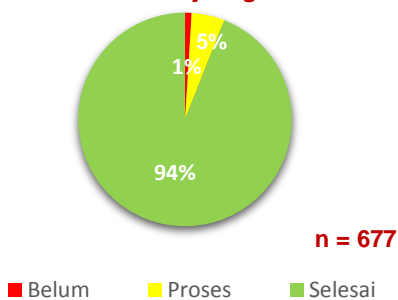
Status Laporan
Pemprov DKI Jakarta



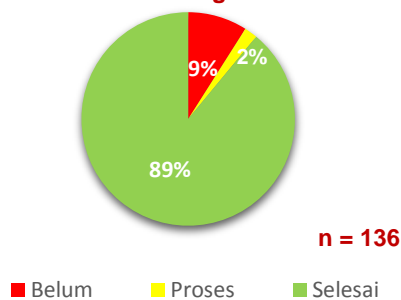
Status Laporan
Pemkot Bandung



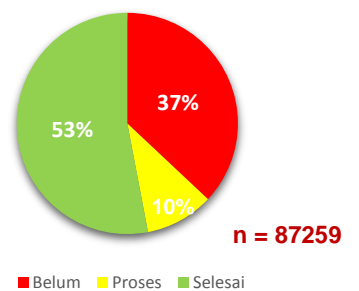
Status Laporan
Pemkab Bojonegoro



Status Laporan
Pemkab Indragiri Hulu



Status Laporan Seluruh K/L/D
Sampai Bulan Juni 2015



Statistik Umum

Pada Juni 2015, terdapat **1197 laporan** yang diteruskan ke instansi pemerintah pusat/daerah untuk ditindaklanjuti (358 laporan berstatus selesai dan 839 laporan masih dalam proses).

Sampai dengan Juni 2015:

- Laporan masuk berjumlah 646.987 dengan rata-rata 574 laporan per hari.
- Komentar publik berjumlah 7387 dengan rata-rata 35 komentar per hari.
- Dukungan (*likes*) berjumlah 17829 dengan rata-rata 84 dukungan per hari.

Perkembangan Terkini

Penelitian mengenai LAPOR!

Sebagai kanal pengaduan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 76/2013 jo. Permenpan 3/2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), LAPOR! terus berusaha meningkatkan kualitasnya. Usaha ini juga didasari atas rekomendasi yang didapat melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh akademisi maupun organisasi masyarakat sipil.

- Pada Juni 2015, telah selesai 2 penelitian terkait LAPOR!, yang berjudul:
1. Penanganan Pengaduan dan Keterampilan Digital terhadap Kepuasan Masyarakat pada Sistem LAPOR!
 2. Perbandingan Usability Situs LAPOR! Versi Lama dan Versi Baru

Tertarik meneliti tentang LAPOR!? Hubungi kami di kontak@lapor.go.id.

Publikasi selengkapnya: <http://blog.lapor.go.id/index.php/publikasi>



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Ringkasan Laporan JUNI 2015

Pertanyaan tentang ringkasan laporan serta saran dalam penyajiannya dapat dikirimkan ke:

kontak@lapor.go.id